

Jurus Politik Telikung Budaya

SARAD

Tahun V

Nomor 50

Juni 2004

hlm. 48-49

Bukannya mengkritisi penggunaan simbol dan praktik adat, budaya, serta agama untuk keuntungan partai politik, orang Bali malah bangga. Jadilah Bali semata objek, bukan subjek politik.

Lebih dari sepuluh tahun lalu, Bupati Bangli IBG Ladip membuat 'kejutan' politik berbungkus budaya. Ia mem-pasupati bendera Golkar (sekarang Partai Golkar) berukuran raksasa, lengkap dengan prosesi ritual. Kalangan kritis tersentak. Mereka protes. "Tidak layak bendera partai politik di-pasupati. Apalagi dengan ritual agama segala. Itu melecehkan agama," sorot para kritisi, saat itu.

Tapi sang Bupati bergeming dengan target membumbung: mayoritas telak kemenangan bagi Golkar. Bendera berwarna kuning itu pun tetap di-pasupati layaknya arca sacral di tempat-tempat suci orang Bali. Suara-suara kritis tetap berlalu, dan kebanyakan orang Bali sendiri malah terkesan bangga-bangga saja tradisi, simbol, bahkan ritual agama mereka digunakan untuk membungkus kepentingan partai politik.

Di masa Orde Baru itu, Golkar amat leluasa menelikung simbol-simbol agama, adat, dan budaya Bali untuk keuntungan politik. Lewat gebyar Golkar, si beringin hijau ini tak dihalangi menabuh kulkul banjar yang disakralkan itu buat mengumpulkan krama (warga) di bale banjar, atau malah menggelar sembahyang politik di pura. Tak jarang malah dilanjutkan dengan ritus balik sumpah untuk senantiasa setia menusuk si beringin hijau. Tentu saja saat begitu krama mengenakan busana adat Bali lengkap, layaknya mengikuti upacara keagamaan betulan.

Suatu kali dalam kampanye Pemilu 1997, kader Golkar yang dinilai paham teks-teks agama Hindu malah berucap lantang di hadapan publik Bali. Si juru kampanye yang kemudian sempat lolos jadi anggota dewan di Renon itu mempersamakan Golkar dengan pohon beringin yang saban kali upacara ngaben di Bali digunakan daunnya. Dengan bungkus filosofi agama, massa Bali pun lunglai.

Usai Soeharto diturunkan paksa mahasiswa 21 Mei 1998, PDI-Perjuangan yang disimbolkan sebagai kelompok tertindas pun bangkit. Manakala partai banteng pimpinan Megawati ini menggelar kongres di Sanur, muncullah pasukan pengamanan menggunakan busana pacalang adat Bali: saput poleng, rompi, udeng, lengkap dengan keris dan bunga pucuk merah. Orang Bali bukan menyalak simbol adat mereka dicontek terang-terangan untuk hajatan politik, malah bangga, girang. Apalagi kongres berjalan mulus, sementara di daerah-daerah lain kerusuhan demi kerusuhan massal sambung menyambung. Sejak itu pacalang sebagai pasukan pengamanan adat Bali melambung. Tak terhitung acara-acara non-adat dan non-Hindu di Bali dibairkan begitu saja leluasa menggunakan pacalang.

Ketua Puast Kajian Hindu, I Gde Sudibya, malah tak mempermasalahkan penggunaan simbol-simbol adat, budaya, dan agama dalam kegiatan partai politik. “Asal penempatannya tepat,” ujarnya.

Namun ia segera menyambung, “Harus diwaspadai bila penggunaan simbol-simbol budaya dan agama dipakai dalam politik secara tidak bertanggung jawab. Misalnya, pasupati bendera partai. Itu berbahaya.”

Toh tidaklah mudah mengontrol penggunaan atribut atau simbol budaya dan agama dalam berpolitik itu menyimpang atau tidak. Ormas-ormas Bali maupun Hindu yang kerap kencang berteriak “pelecehan” manakala kalangan luar Bali atau non-Hindu [49] menggunakan simbol adat, budaya, dan agama itu pun “damai-damai” saja melihat partai politik menjungkirbalikkan simbol budaya maupun agama. Tak heran, saat kampanye Pemilu 2004 pun banyak partai politik tetap saja berlaku begitu—dan tetap tak ada protes.

Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), misalnya, sempat menggelar “kampanye budaya”: ada ogoh-ogoh lengkap dengan busana adat. Mbak Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang menjadi presiden Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sempat disambut bak *nedunang batara* di Mas, Ubud. Bekas Pangab Wiranto yang berkampanye untuk Partai Golkar pun tampil di hadapan massanya di Bali dengan busana adat Bali lengkap.

Tak ketinggalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menggelar pawai bersama bernapaskan budaya Bali, ketika menyelenggarakan kampanye bersama mengawali masa kampanye partai politik di Bali dalam pemilu legislative 2004. Apakah semua itu dapat disebut sebagai eksploitasi budaya untuk keuntungan politik?

Ketua KPU Bali, AA Oka Wisnumurti, menampik praktik-praktik demikian sebagai bentuk eksploitasi budaya untuk kepentingan politik. “Justru sebaliknya, kami ingin membungkus politik dengan budaya sehingga politik lebih santun dan berbudaya,” kelitnya.

Karena orang Bali sendiri sebagai pemilik adat, budaya, dan penganut agama Hindu di Bali tidak memprotes, maka dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unud, I Nyoman Wijaya, pun menilai praktik demikian tak dapat digolongkan eksploitasi budaya.

“Nyatanya orang Bali, selaku pemilik budaya Bali, tidak merasa dieksploitasi. Bahkan kadang merasa bangga dan senang bila atribut atau simbol budayanya dikenakan tokoh-tokoh politik atau digunakan dalam berpolitik,” sebutnya.

Adakah itu karena keterbukaan atau malah sekadar kepolosan orang Bali? Atau malah karena ketidakpedulian, atau ketidaktauan dan ketidakmampuan orang Bali membaca niat dan muatan politik yang halus di balik bungkus penetrasi (penerobosan) budaya itu? Entahlah.

Bagi Wijaya, soal yang lebih mendesak dan strategis mesti dijawab: mengapa selama ini orang Bali lebih sering menjadi objek politik tinimbang subjek politik? Sejak Pemilu 1955 masyarakat Bali selalu saja menjadi objek politik, karena orang Bali tidak pernah menjadi

pimpinan partai di pusat. “Meskipun ada individu orang Bali berkiprah di Jakarta, tetapi secara umum tetap saja masyarakat Bali sebagai objek politik Jakarta,” tunjuk Wijaya.

Dia mencermati, selama ini masyarakat Bali belum pernah sebagai produsen: mendirikan partai politik sendiri, *m[sic]* lalu mencari massa ke Jawa. “Pernahkah orang Bali melakukan seperti itu? Kalau bisa begitu, baru bisa disebut sebagai subjek politik,” terangnya.

Fakta yang terjadi: orang Bali merasa puas hanya sebagai konsumen dan objek politik, dengan alasan minoritas. Sebagai konsumen, dia “menelan” setiap produk politik dari Jakarta. Kondisi masyarakat Bali kebanyakn sebagai kelompok tradisional-patrilineal juga turut menjadikan mudah digerakkan oleh ‘mereka’ yang lebih ‘kuat’. Setiap yang datang dari Jakarta, masuk dan menggunakan orang berpengaruh dalam kehidupan tradisi Bali, sontak saja “ditelan”.

Sikap mudah menerima setiap yang dikatakan dan diinginkan Jakarta, dalam analisa Gde Sudibya, tak lepas dari kondisi masyarakat Bali. Di satu sisi masyarakat Bali masih dalam sistem masyarakat agraris. Di sisi lain, masyarakat Bali sudah bekerja ‘di luar’ sistem agraris. Dan di sisi satunya lagi, kemampuan analisa masyarakat Bali masih terbatas. “Itu menjadikan mereka mudah menerima,” jelas Sudibya.

Kini, ketika era politik sentralistik serba Jakarta sudah berubah menjadi desentralisasi, tak sepatutnya lagi orang Bali manut-manut saja. “Kita harus kritis,” tegasnya.

Untuk itu, Sudibya menawarkan agar momentum demokratisasi kini dimanfaatkan masyarakat Bali untuk keluar dari posisi objek politik, berbalik menjadi subjek politik. Caranya? Masyarakat Bali harus memperkuat posisi tawar dalam berpolitik. Upaya itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menciptakan jaringan nasional. Langkah demikian sepatutnya diikuti dengan meningkatkan kemampuan berargumentasi dan meningkatkan kecerdasan diri masing-masing maupun kecerdasan kolektif. “Tak kalah penting, bagaimana meningkatkan ‘kemampuan’ energy untuk memperjuangkan upaya-upaya itu,” ajak Sudibya. Jadi, tunggu apa lagi?